



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR: 75/Permentan/OT.140/7/2013

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 06/PERMENTAN/OT.140/1/2013 TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS  
BIDANG PERTANIAN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/1/2013 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2013;
- b. bahwa untuk dapat memberikan prioritas dalam pemenuhan kelengkapan minimal seperangkat alat bantu pelayanan pembelajaran pada Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan, perlu mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/1/2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5361);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAK Tahun Anggaran 2013;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2013;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 06/PERMENTAN/OT.140/1/2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN TAHUN 2013**

## Pasal I

1. Mengubah lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2013, sebagai berikut:

a. Bab II **KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PEMANFAATAN DAK BIDANG PERTANIAN TAHUN 2013.**

### B. DAK BIDANG PERTANIAN KABUPATEN/KOTA

#### B.3.e. Penyediaan Prasarana dan Sarana Penyuluhan

Sehingga keseluruhan menjadi sebagai berikut:

Penyediaan prasarana dan sarana penyuluhan untuk:

(i) Penyediaan seperangkat alat bantu penyuluhan bagi kantor BPPK guna memenuhi kelengkapan minimal dalam pelayanan pembelajaran, antara lain berupa *Overhead projector (OHP)*, *LCD projector*, *wireless*, *megaphone*, *MIC*, televisi, *VCD*, *white board*, *tape recorder*, komputer, *printer*, *display*, dan digital camera, serta kendaraan roda 2 (dua) bagi penyuluh pertanian dan Mantri Tani (Pegawai Negeri Sipil).

(ii) Apabila kantor BPPK Kabupaten/Kota yang ada telah direhabilitasi/direnovasi dan dilengkapi sarana alat bantu pembelajaran penyuluh pertanian seperti tersebut di atas, maka Kabupaten/Kota dapat membangun gedung BPPK menggunakan anggaran DAK dimaksud.

b. Lampiran **13 BANGUNAN BPPK YANG PERLU DIBANGUN /REHABILITASI/RENOVASI, KEBUTUHAN ALAT BANTU PEMBELAJARAN, KEBUTUHAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA-2 UNTUK PENYULUHAN PERTANIAN.**

Sehingga keseluruhan menjadi sebagai berikut:

Format 13 **KERAGAAN DATA PENYULUH PERTANIAN PNS DAN BPP KECAMATAN PER 31 DESEMBER 2012**, seperti tercantum dalam lampiran format 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/1/2013, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2013

MENTERI PERTANIAN,



Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Gubernur Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian seluruh Indonesia.

Format 13 . KERAGAAN DATA PENYULUH PERTANIAN PNS DAN BPP KECAMATAN PER 31 DESEMBER 2012

NO.	PROVINSI KABUPATEN/KOTA		KERAGAAN DATA			
			KEC	BPP EKSISTIN G	JUMLAH PENYULUH PERTANIAN (PNS)	PENYULUH PERTANIAN PNS YANG SUDAH DI FASILITASI R-2
1	2		3	4	5	6
<b>I. Aceh</b>			<b>287</b>	<b>262</b>	<b>1.109</b>	<b>271</b>
	<b>Provinsi</b>				33	7
1	Kab.	Aceh Barat	12	12	69	19
2	Kab.	Aceh Barat Daya	9	6	39	6
3	Kab.	Aceh Besar	22	12	101	12
4	Kab.	Aceh Jaya	6	6	16	9
5	Kab.	Aceh Selatan	16	10	59	11
6	Kab.	Aceh Singkil	12	12	39	8
7	Kab.	Aceh Tamiang	12	11	33	12
8	Kab.	Aceh Tengah	14	14	59	23
9	Kab.	Aceh Tenggara	16	16	59	10
10	Kab.	Aceh Timur	24	24	104	20
11	Kab.	Aceh Utara	27	22	114	35
12	Kab.	Bener Meriah	10	10	41	8
13	Kab.	Bireun	17	17	147	13
14	Kab.	Gayo Lues	11	11	14	10
15	Kab.	Nagan Raya	8	8	43	10
16	Kab.	Pidie	30	30	65	26
17	Kab.	Pidie Jaya	8	8	19	5
18	Kab.	Simeulue	8	8	15	7
19	Kota	Banda Aceh	9	9	8	7
20	Kota	Langsa	5	5	17	5
21	Kota	Lhokseumawe	4	4	1	4
22	Kota	Sabang	2	2	11	2
23	Kota	Subulussalam	5	5	3	2
<b>II. Sumatera Utara</b>			<b>419</b>	<b>343</b>	<b>1.356</b>	<b>400</b>
	<b>Provinsi</b>				40	11
1	Kab.	Asahan	25	24	77	17
2	Kab.	Batubara	7	7	48	11
3	Kab.	Dairi	15	14	71	12
4	Kab.	Deli Serdang	22	10	105	33
5	Kab.	Humbang Hasundutan	10	-	59	6
6	Kab.	Karo	17	17	45	33
7	Kab.	Labuhan Batu	9	9	62	26
8	Kab.	Labuhan Batu Utara	8	8	37	5
9	Kab.	Labuhan Batu Selatan	5	-	38	3
10	Kab.	Langkat	23	19	69	13
11	Kab.	Mandailing Natal	23	17	45	30
12	Kab.	Nias	9	9	32	10
13	Kab.	Nias Barat	8	8	3	-
14	Kab.	Nias Utara	11	5	12	2
15	Kab.	Nias Selatan	18	7	23	5
16	Kab.	Padang Lawas	9	9	72	5
17	Kab.	Padang Lawas Utara	8	-	32	3

NO.	PROVINSI KABUPATEN/KOTA		KERAGAAN DATA			
			KEC	BPP EKSISTIN G	JUMLAH PENYULUH PERTANIAN (PNS)	PENYULUH PERTANIAN PNS YANG SUDAH DI FASILITASI R-2
1	2		3	4	5	6
18	Kab.	Pakpak Bharat	8	8	59	11
19	Kab.	Samosir	9	9	34	9
20	Kab.	Serdang Bedagai	21	21	42	35
21	Kab.	Simalungun	31	31	78	52
22	Kab.	Tapanuli Selatan	15	15	85	14
23	Kab.	Tapanuli Tengah	8	8	34	8
24	Kab.	Tapanuli Utara	15	15	50	13
25	Kab.	Toba Samosir	16	16	31	5
26	Kota	Binjai	5	5	22	5
27	Kota	Gunung Sitoli	6	6	5	-
28	Kota	Medan	21	21	13	7
29	Kota	Padang Sidempuan	14	14	20	6
30	Kota	Pematang Siantar	8	6	7	5
31	Kota	Sibolga	4	4	-	2
32	Kota	Tanjung Balai	6	-	2	2
33	Kota	Tebing Tinggi	5	1	4	1
<b>III. Sumatera Barat</b>			<b>176</b>	<b>149</b>	<b>931</b>	<b>202</b>
		<b>Provinsi</b>			<b>36</b>	<b>6</b>
1	Kab.	Agam	16	16	119	18
2	Kab.	Dharmasraya	11	8	33	7
3	Kab.	Kepulauan Mentawai	10	2	5	2
4	Kab.	Lima Puluh Kota	13	13	62	18
5	Kab.	Padang Pariaman	17	17	65	14
6	Kab.	Pasaman	12	6	59	35
7	Kab.	Pasaman Barat	11	9	44	10
8	Kab.	Pesisir Selatan	12	12	83	12
9	Kab.	Sijunjung	8	8	52	11
10	Kab.	Solok	14	14	103	15
11	Kab.	Solok Selatan	7	7	30	5
12	Kab.	Tanah Datar	14	14	89	16
13	Kota	Bukit Tinggi	3	3	15	3
14	Kota	Padang	11	3	58	8
15	Kota	Padang Panjang	2	2	12	5
16	Kota	Pariaman	4	4	10	3
17	Kota	Payakumbuh	5	5	30	7
18	Kota	Sawahlunto	4	4	17	3
19	Kota	Solok	2	2	9	4
<b>IV. Riau</b>			<b>153</b>	<b>119</b>	<b>865</b>	<b>234</b>
		<b>Provinsi</b>			<b>25</b>	<b>10</b>
1	Kab.	Bengkalis	8	8	47	13
2	Kab.	Indragiri Hilir	20	14	124	35
3	Kab.	Indragiri Hulu	14	14	49	16
4	Kab.	Kampar	20	20	186	36
5	Kab.	Kuantan Singingi	12	6	113	14

NO.	PROVINSI KABUPATEN/KOTA	KERAGAAN DATA			
		KEC	BPP EKSISTIN G	JUMLAH PENYULUH PERTANIAN (PNS)	PENYULUH PERTANIAN PNS YANG SUDAH DI FASILITASI R-2
1	2	3	4	5	6
6	Kab. Kepulauan Meranti	5	4	11	15
7	Kab. Pelalawan	12	12	63	17
8	Kab. Rokan Hilir	13	5	118	11
9	Kab. Rokan Hulu	16	9	47	16
10	Kab. Siak	14	14	52	31
11	Kota Dumai	7	5	12	9
12	Kota Pekanbaru	12	8	18	11
<b>V. Jambi</b>		<b>129</b>	<b>111</b>	<b>894</b>	<b>291</b>
				26	12
1	Kab. Batanghari	8	8	72	12
2	Kab. Bungo	17	17	164	21
3	Kab. Kerinci	12	12	96	22
4	Kab. Merangin	24	16	121	63
5	Kab. Muaro Jambi	11	11	79	52
6	Kab. Sarolangun	10	8	78	19
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	13	5	57	40
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	11	11	80	17
9	Kab. Tebo	12	12	65	16
10	Kota Jambi	6	6	31	10
11	Kota Sungai Penuh	5	5	25	7
<b>VI. Sumatera Selatan</b>		<b>221</b>	<b>140</b>	<b>1.191</b>	<b>475</b>
	<b>Provinsi</b>			21	14
1	Kab. Banyuasin	17	17	157	24
2	Kab. Empat Lawang	8	8	31	4
3	Kab. Lahat	21	14	52	64
4	Kab. Muara Enim	22	8	188	30
5	Kab. Musi Banyuasin	12	12	123	27
6	Kab. Musi Rawas	21	21	141	59
7	Kab. Ogan Ilir	16	4	42	34
8	Kab. Ogan Komering Ilir	18	16	127	16
9	Kab. Ogan Komering Ulu	12	5	66	53
10	Kab. OKU Selatan	19	8	44	25
11	Kab. OKU Timur	20	12	88	17
12	Kota Lubuk Linggau	8	3	38	13
13	Kota Pagar Alam	5	5	15	57
14	Kota Palembang	16	4	33	4
15	Kota Prabumulih	6	3	25	34
<b>VII. Bengkulu</b>		<b>139</b>	<b>100</b>	<b>633</b>	<b>292</b>
	<b>Provinsi</b>			12	13

NO.	PROVINSI KABUPATEN/KOTA		KERAGAAN DATA			
			KEC	BPP EKSISTIN G	JUMLAH PENYULUH PERTANIAN (PNS)	PENYULUH PERTANIAN PNS YANG SUDAH DI FASILITASI R-2
1	2		3	4	5	6
1	Kab.	Bengkulu Selatan	17	9	69	32
2	Kab.	Bengkulu Tengah	10	10	32	3
3	Kab.	Bengkulu Utara	18	17	140	33
4	Kab.	Kaur	15	15	41	13
5	Kab.	Kepahiang	13	4	38	36
6	Kab.	Lebong	13	6	38	17
7	Kab.	Mukomuko	15	15	55	48
8	Kab.	Rejang Lebong	15	10	71	62
9	Kab.	Seluma	14	5	90	23
10	Kota	Bengkulu	9	9	47	12
<b>VIII. Lampung</b>			<b>210</b>	<b>205</b>	<b>945</b>	<b>336</b>
	<b>Provinsi</b>				20	15
1	Kab.	Lampung Barat	17	17	53	37
2	Kab.	Lampung Selatan	17	17	130	45
3	Kab.	Lampung Tengah	28	28	130	26
4	Kab.	Lampung Timur	24	24	133	22
5	Kab.	Lampung Utara	23	23	85	49
6	Kab.	Mesuji	7	7	51	3
7	Kab.	Pesawaran	8	8	41	3
8	Kab.	Pringsewu	8	8	61	8
9	Kab.	Tanggamus	23	23	58	24
10	Kab.	Tulang Bawang	15	14	64	45
11	Kab.	Tulang Bawang Barat	8	8	29	2
12	Kab.	Way Kanan	14	14	47	31
13	Kota	Bandar Lampung	13	9	17	11
14	Kota	Metro	5	5	26	15
<b>IX. Kepulauan Bangka-Belitung</b>			<b>45</b>	<b>26</b>	<b>107</b>	<b>54</b>
	<b>Provinsi</b>				2	7
1	Kab.	Bangka	8	8	28	13
2	Kab.	Bangka Barat	6	5	3	6
3	Kab.	Bangka Selatan	7	2	11	8
4	Kab.	Bangka Tengah	6	4	7	4
5	Kab.	Belitung	5	3	25	9
6	Kab.	Belitung Timur	7	3	12	5
7	Kota	Pangkal Pinang	6	1	19	2
<b>X. Kepulauan Riau</b>			<b>59</b>	<b>16</b>	<b>73</b>	<b>35</b>
	<b>Provinsi</b>				-	3
1	Kab.	Bintan	10	6	45	12
2	Kab.	Karimun	9	4	17	6



NO.	PROVINSI KABUPATEN/KOTA		KERAGAAN DATA			
			KEC	BPP EKSISTIN G	JUMLAH PENYULUH PERTANIAN (PNS)	PENYULUH PERTANIAN PNS YANG SUDAH DI FASILITASI R-2
1	2		3	4	5	6
3	Kab.	Kepulauan Anambas	7	-	-	1
4	Kab.	Lingga	5	5	2	3
5	Kab.	Natuna	12	-	5	6
6	Kab.	Tanjung Pinang	4	-	-	2
7	Kota	Batam	12	1	4	2
<b>XI. DKI Jakarta</b>			<b>44</b>	<b>5</b>	<b>66</b>	<b>40</b>
	<b>Provinsi</b>				6	9
1	Kab.	Adm. Kepulauan Seribu	2	-	-	1
2	Kota	Jakarta Barat	8	2	7	6
3	Kota	Jakarta Pusat	8	1	11	5
4	Kota	Jakarta Selatan	10	-	16	9
5	Kota	Jakarta Timur	10	-	17	6
6	Kota	Jakarta Utara	6	2	9	4
<b>XII. Jawa Barat</b>			<b>624</b>	<b>444</b>	<b>2.145</b>	<b>762</b>
	<b>Provinsi</b>				17	6
1	Kab.	Bandung	31	8	103	32
2	Kab.	Bandung Barat	15	15	68	11
3	Kab.	Bekasi	23	23	70	24
4	Kab.	Bogor	40	12	112	61
5	Kab.	Ciamis	36	36	152	62
6	Kab.	Cianjur	32	30	142	37
7	Kab.	Cirebon	40	16	130	102
8	Kab.	Garut	42	42	115	48
9	Kab.	Indramayu	28	31	156	53
10	Kab.	Karawang	30	30	116	34
11	Kab.	Kuningan	32	15	109	42
12	Kab.	Majalengka	26	26	145	44
13	Kab.	Purwakarta	17	3	51	13
14	Kab.	Subang	30	30	137	42
15	Kab.	Sukabumi	47	47	135	54
16	Kab.	Sumedang	26	13	112	16
17	Kab.	Tasikmalaya	39	39	159	40
18	Kota	Bandung	29	-	7	2
19	Kota	Banjar	4	4	18	7
20	Kota	Bekasi	12	4	9	3
21	Kota	Bogor	6	6	9	5
22	Kota	Cimahi	3	1	1	1
23	Kota	Cirebon	5	-	7	7
24	Kota	Depok	11	2	11	5
25	Kota	Sukabumi	7	7	22	4
26	Kota	Tasikmalaya	13	4	32	7

NO.	PROVINSI KABUPATEN/KOTA		KERAGAAN DATA			
			KEC	BPP EKSISTIN G	JUMLAH PENYULUH PERTANIAN (PNS)	PENYULUH PERTANIAN PNS YANG SUDAH DI FASILITASI R-2
1	2		3	4	5	6
<b>XIII. Jawa Tengah</b>			<b>576</b>	<b>521</b>	<b>2.366</b>	<b>757</b>
	<b>Provinsi</b>				30	8
1	Kab.	Banjarnegara	20	20	92	52
2	Kab.	Banyumas	27	8	85	15
3	Kab.	Batang	15	15	59	11
4	Kab.	Blora	16	16	65	33
5	Kab.	Boyolali	19	19	104	12
6	Kab.	Brebes	17	17	83	32
7	Kab.	Cilacap	24	24	80	14
8	Kab.	Demak	14	5	76	8
9	Kab.	Grobogan	19	19	80	30
10	Kab.	Jepara	16	16	69	9
11	Kab.	Karanganyar	19	19	76	31
12	Kab.	Kebumen	27	27	74	32
13	Kab.	Kendal	20	20	63	21
14	Kab.	Klaten	26	26	77	13
15	Kab.	Kudus	9	9	43	18
16	Kab.	Magelang	21	21	118	33
17	Kab.	Pati	21	21	71	47
18	Kab.	Pekalongan	19	19	53	10
19	Kab.	Pemalang	14	14	74	32
20	Kab.	Purbalingga	18	18	93	55
21	Kab.	Purworejo	16	16	77	13
22	Kab.	Rembang	14	14	69	19
23	Kab.	Semarang	19	19	87	22
24	Kab.	Sragen	20	20	109	65
25	Kab.	Sukoharjo	12	12	67	9
26	Kab.	Tegal	18	18	85	54
27	Kab.	Temanggung	20	20	67	14
28	Kab.	Wonogiri	25	25	107	9
29	Kab.	Wonosobo	15	15	78	13
30	Kota	Magelang	3	1	4	2
31	Kota	Pekalongan	4	1	6	2
32	Kota	Salatiga	4	4	12	7
33	Kota	Semarang	16	2	13	5
34	Kota	Surakarta	5	-	3	1
35	Kota	Tegal	4	1	17	6
<b>XIV. DI Yogyakarta</b>			<b>79</b>	<b>57</b>	<b>308</b>	<b>90</b>
	<b>Provinsi</b>				15	7
1	Kab.	Bantul	17	17	63	13
2	Kab.	Gunung Kidul	18	18	87	34
3	Kab.	Kulon Progo	13	13	55	16
4	Kab.	Sleman	17	8	81	16
5	Kota	Yogyakarta	14	1	7	4
<b>XV. Jawa Timur</b>			<b>662</b>	<b>585</b>	<b>2.643</b>	<b>768</b>
	<b>Provinsi</b>				24	4
1	Kab.	Bangkalan	18	18	40	11
2	Kab.	Banyuwangi	24	23	130	22
3	Kab.	Blitar	22	22	129	44
4	Kab.	Bojonegoro	27	27	83	20
5	Kab.	Bondowoso	23	7	60	22
6	Kab.	Gresik	18	18	63	18
7	Kab.	Jember	31	10	164	61

NO.	PROVINSI KABUPATEN/KOTA	KERAGAAAN DATA			
		KEC	BPP EKSISTIN G	JUMLAH PENYULUH PERTANIAN (PNS)	PENYULUH PERTANIAN PNS YANG SUDAH DI FASILITASI R-2
1	2	3	4	5	6
8	Kab. Jombang	21	21	115	15
9	Kab. Kediri	26	26	100	29
10	Kab. Lamongan	27	27	58	19
11	Kab. Lumajang	21	21	70	17
12	Kab. Madiun	15	15	74	21
13	Kab. Magetan	18	18	81	39
14	Kab. Malang	33	33	134	57
15	Kab. Mojokerto	18	18	90	34
16	Kab. Nganjuk	20	8	108	24
17	Kab. Ngawi	19	19	96	22
18	Kab. Pacitan	12	12	45	29
19	Kab. Pamekasan	13	13	40	10
20	Kab. Pasuruan	24	24	76	26
21	Kab. Ponorogo	21	21	128	31
22	Kab. Probolinggo	24	24	89	22
23	Kab. Sampang	14	14	44	11
24	Kab. Sidoarjo	18	18	71	13
25	Kab. Situbondo	17	17	74	15
26	Kab. Sumenep	27	27	71	10
27	Kab. Trenggalek	14	14	80	26
28	Kab. Tuban	20	20	84	33
29	Kab. Tulungagung	19	19	109	25
30	Kota Batu	3	3	29	8
31	Kota Blitar	3	3	9	4
32	Kota Kediri	3	3	16	6
33	Kota Madiun	3	3	4	1
34	Kota Malang	5	5	15	4
35	Kota Mojokerto	2	2	9	6
36	Kota Pasuruan	3	3	5	1
37	Kota Probolinggo	5	5	4	1
38	Kota Surabaya	31	4	22	7
<b>XVI. Banten</b>		<b>160</b>	<b>84</b>	<b>279</b>	<b>203</b>
	<b>Provinsi</b>			<b>4</b>	<b>-</b>
1	Kab. Lebak	28	6	17	41
2	Kab. Pandeglang	35	7	100	42
3	Kab. Serang	34	34	80	45
4	Kab. Tangerang	29	10	42	48
5	Kota Cilegon	8	8	8	8
6	Kota Serang	6	6	16	7
7	Kota Tangerang	13	13	6	6
8	Kota Tangerang Selatan	7	-	6	6
<b>XVII. Bali</b>		<b>57</b>	<b>56</b>	<b>719</b>	<b>229</b>
	<b>Provinsi</b>			<b>67</b>	<b>4</b>
1	Kab. Badung	6	5	51	13
2	Kab. Bangli	5	5	92	63
3	Kab. Buleleng	9	9	113	21
4	Kab. Gianyar	7	7	83	30
5	Kab. Jembrana	4	4	52	15
6	Kab. Karangasem	8	8	53	14
7	Kab. Klungkung	4	4	45	10

NO.	PROVINSI KABUPATEN/KOTA	KERAGAAN DATA			
		KEC	BPP EKSISTIN G	JUMLAH PENYULUH PERTANIAN (PNS)	PENYULUH PERTANIAN PNS YANG SUDAH DI FASILITASI R-2
1	2	3	4	5	6
8	Kab. Tabanan	10	10	141	51
9	Kota Denpasar	4	4	22	8
<b>XVIII. Nusa Tenggara Barat</b>		<b>121</b>	<b>115</b>	<b>815</b>	<b>265</b>
	<b>Provinsi</b>			<b>34</b>	<b>10</b>
1	Kab. Bima	18	18	88	26
2	Kab. Dompu	8	8	64	22
3	Kab. Lombok Barat	15	15	98	44
4	Kab. Lombok Tengah	12	12	140	34
5	Kab. Lombok Timur	20	20	163	50
6	Kab. Lombok Utara	5	5	17	2
7	Kab. Sumbawa	24	18	115	33
8	Kab. Sumbawa Barat	8	8	38	15
9	Kota Bima	5	5	24	13
10	Kota Mataram	6	6	34	16
<b>XIX. Nusa Tenggara Timur</b>		<b>293</b>	<b>228</b>	<b>1.199</b>	<b>325</b>
	<b>Provinsi</b>			<b>25</b>	<b>8</b>
1	Kab. Alor	17	9	59	14
2	Kab. Belu	24	24	114	19
3	Kab. Ende	21	21	88	25
4	Kab. Flores Timur	19	19	60	19
5	Kab. Kupang	24	15	93	17
6	Kab. Lembata	9	9	64	14
7	Kab. Manggarai	9	9	69	25
8	Kab. Manggarai Barat	7	6	62	13
9	Kab. Manggarai Timur	6	6	38	6
10	Kab. Nagekeo	7	7	70	7
11	Kab. Ngada	9	9	46	25
12	Kab. Rote Ndao	8	6	15	7
13	Kab. Sabu Raijuwa	6	-	-	-
14	Kab. Sikka	21	4	71	27
15	Kab. Sumba Barat	8	8	17	18
16	Kab. Sumba Barat Daya	11	11	67	4
17	Kab. Sumba Tengah	5	5	23	4
18	Kab. Sumba Timur	22	15	58	26
19	Kab. Timor Tengah Selatan	32	32	114	18
20	Kab. Timor Tengah Utara	24	9	23	21
21	Kota Kupang	4	4	23	8
<b>XX. KALIMANTAN BARAT</b>		<b>178</b>	<b>135</b>	<b>759</b>	<b>299</b>
	<b>Provinsi</b>			<b>8</b>	<b>8</b>
1	Kab. Bengkayang	17	17	46	32
2	Kab. Kapuas Hulu	25	7	76	43
3	Kab. Kayong Utara	5	5	27	3

NO.	PROVINSI KABUPATEN/KOTA		KERAGAAN DATA			
			KEC	BPP EKSISTIN G	JUMLAH PENYULUH PERTANIAN (PNS)	PENYULUH PERTANIAN PNS YANG SUDAH DI FASILITASI R-2
1	2		3	4	5	6
4	Kab.	Ketapang	20	8	59	23
5	Kab.	Kubu Raya	9	9	57	8
6	Kab.	Landak	13	13	61	18
7	Kab.	Melawi	11	6	34	22
8	Kab.	Pontianak	14	14	63	32
9	Kab.	Sambas	17	17	91	29
10	Kab.	Sanggau	15	15	67	29
11	Kab.	Sekadau	7	7	42	12
12	Kab.	Sintang	14	8	102	20
13	Kota	Pontianak	6	6	5	7
14	Kota	Singkawang	5	3	21	13
<b>XXI. Kalimantan Tengah</b>			<b>121</b>	<b>89</b>	<b>745</b>	<b>211</b>
		<b>Provinsi</b>			<b>12</b>	<b>6</b>
1	Kab.	Barito Selatan	6	6	79	22
2	Kab.	Barito Timur	10	6	74	17
3	Kab.	Barito Utara	5	5	18	10
4	Kab.	Gunung Mas	11	11	25	9
5	Kab.	Kapuas	12	8	139	32
6	Kab.	Katingan	13	11	55	15
7	Kab.	Kotawaringin Barat	6	6	94	14
8	Kab.	Kotawaringin Timur	15	8	104	20
9	Kab.	Lamandau	8	8	10	8
10	Kab.	Murung Raya	10	1	17	9
11	Kab.	Pulang Pisau	8	8	65	20
12	Kab.	Seruyan	7	7	14	8
13	Kab.	Sukamara	5	1	9	6
14	Kota	Palangkaraya	5	3	30	15
<b>XXII. Kalimantan Selatan</b>			<b>151</b>	<b>117</b>	<b>980</b>	<b>368</b>
		<b>Provinsi</b>			<b>36</b>	<b>16</b>
1	Kab.	Balangan	8	8	49	5
2	Kab.	Banjarnegara	19	19	164	51
3	Kab.	Barito Kuala	17	11	94	36
4	Kab.	Hulu Sungai Selatan	11	11	88	33
5	Kab.	Hulu Sungai Tengah	11	11	59	33
6	Kab.	Hulu Sungai Utara	10	9	54	27
7	Kab.	Kotabaru	20	5	38	21
8	Kab.	Tabalong	12	7	94	24
9	Kab.	Tanah Bumbu	10	4	53	17
10	Kab.	Tanah Laut	11	11	102	62
11	Kab.	Tapin	12	12	99	23
12	Kota	Banjarnegara	5	4	31	13
13	Kota	Banjarmasin	5	5	19	7
<b>XXIII. Kalimantan Timur</b>			<b>136</b>	<b>93</b>	<b>774</b>	<b>250</b>

NO.	PROVINSI KABUPATEN/KOTA		KERAGAAN DATA			
			KEC	BPP EKSISTIN G	JUMLAH PENYULUH PERTANIAN (PNS)	PENYULUH PERTANIAN PNS YANG SUDAH DI FASILITASI R-2
1	2		3	4	5	6
	<b>Provinsi</b>				<b>14</b>	<b>8</b>
1	Kab.	Berau	13	7	48	40
2	Kab.	Bulungan	10	6	48	13
3	Kab.	Kutai Barat	21	7	44	13
4	Kab.	Kutai Kartanegara	18	16	205	35
5	Kab.	Kutai Timur	18	17	106	15
6	Kab.	Malinau	12	11	11	11
7	Kab.	Nunukan	9	9	59	13
8	Kab.	Penajam Paser Utara	4	3	32	19
9	Kab.	Paser	10	9	120	43
10	Kab.	Tana Tidung	3	-	-	-
11	Kota	Balikpapan	5	2	26	15
12	Kota	Bontang	3	1	3	4
13	Kota	Samarinda	6	4	55	19
14	Kota	Tarakan	4	1	3	2
<b>XXIV. Sulawesi Utara</b>			<b>153</b>	<b>126</b>	<b>835</b>	<b>314</b>
	<b>Provinsi</b>				<b>33</b>	<b>14</b>
1	Kab.	Bolaang Mongondow	12	13	114	84
2	Kab.	Bolmong Utara	6	7	28	4
3	Kab.	Bolmong Timur	5	-	40	2
4	Kab.	Bolmong Selatan	5	5	59	3
5	Kab.	Kepulauan Sangihe	15	15	45	18
6	Kab.	Kep. Siau Tagulandang Biaro	10	-	29	2
7	Kab.	Minahasa	22	19	31	35
8	Kab.	Minahasa Selatan	17	20	106	58
9	Kab.	Minahasa Tenggara	6	12	84	3
10	Kab.	Minahasa Utara	10	10	29	40
11	Kab.	Talaud	19	5	66	7
12	Kota	Bitung	8	8	29	12
13	Kota	Kotamobagu	4	-	32	2
14	Kota	Manado	9	7	38	11
15	Kota	Tomohon	5	5	72	19
<b>XXV. Sulawesi Tengah</b>			<b>154</b>	<b>117</b>	<b>719</b>	<b>250</b>
	<b>Provinsi</b>				<b>20</b>	<b>11</b>
1	Kab.	Banggai	18	13	110	29
2	Kab.	Banggai Kepulauan	19	5	72	12
3	Kab.	Buol	11	11	55	35
4	Kab.	Donggala	16	15	87	50
5	Kab.	Morowali	14	18	35	14
6	Kab.	Parigi Moutong	20	10	74	20
7	Kab.	Poso	18	12	101	28
8	Kab.	Sigi	15	10	48	6

NO.	PROVINSI KABUPATEN/KOTA		KERAGAAN DATA			
			KEC	BPP EKSISTIN G	JUMLAH PENYULUH PERTANIAN (PNS)	PENYULUH PERTANIAN PNS YANG SUDAH DI FASILITASI R-2
1	2		3	4	5	6
9	Kab.	Tojo Unauna	9	9	40	9
10	Kab.	Toli-Toli	10	10	39	22
11	Kota	Palu	4	4	38	14
<b>XXVI. Sulawesi Selatan</b>			<b>302</b>	<b>305</b>	<b>1.894</b>	<b>556</b>
	<b>Provinsi</b>				<b>44</b>	<b>11</b>
1	Kab.	Bantaeng	8	8	22	26
2	Kab.	Barru	7	7	78	18
3	Kab.	Bone	27	27	116	38
4	Kab.	Bulukumba	10	10	104	21
5	Kab.	Enrekang	10	12	90	18
6	Kab.	Gowa	18	18	120	32
7	Kab.	Jeneponto	11	12	60	17
8	Kab.	Luwu	21	21	41	22
9	Kab.	Luwu Timur	11	11	86	10
10	Kab.	Luwu Utara	11	11	29	14
11	Kab.	Maros	14	14	99	46
12	Kab.	Pangkajene Kepulauan	13	13	115	19
13	Kab.	Pinrang	12	12	82	39
14	Kab.	Selayar	11	11	140	35
15	Kab.	Sidenreng Rappang	11	11	121	33
16	Kab.	Sinjai	9	9	62	42
17	Kab.	Soppeng	8	8	82	18
18	Kab.	Takalar	9	9	58	19
19	Kab.	Tana Toraja	19	19	61	21
20	Kab.	Toraja Utara	21	21	32	4
21	Kab.	Wajo	14	14	106	25
22	Kota	Makassar	14	14	25	11
23	Kota	Palopo	9	9	75	12
24	Kota	Pare-pare	4	4	46	5
<b>XXVII. Sulawesi Tenggara</b>			<b>201</b>	<b>154</b>	<b>733</b>	<b>243</b>
	<b>Provinsi</b>				<b>18</b>	<b>14</b>
1	Kab.	Bombana	22	11	37	14
2	Kab.	Buton	21	22	66	22
3	Kab.	Buton Utara	6	-	17	1
4	Kab.	Kolaka	20	20	152	31
5	Kab.	Kolaka Utara	15	3	13	8
6	Kab.	Konawe	30	30	142	63
7	Kab.	Konawe Selatan	22	15	105	33
8	Kab.	Konawe Utara	7	7	10	4
9	Kab.	Muna	33	30	104	29
10	Kab.	Wakatobi	8	1	4	5
11	Kota	Bau-Bau	7	5	30	8

NO.	PROVINSI KABUPATEN/KOTA		KERAGAAN DATA			
			KEC	BPP EKSISTIN G	JUMLAH PENYULUH PERTANIAN (PNS)	PENYULUH PERTANIAN PNS YANG SUDAH DI FASILITASI R-2
1	2		3	4	5	6
12	Kota	Kendari	10	10	35	11
<b>XXVIII. Gorontalo</b>			<b>66</b>	<b>65</b>	<b>252</b>	<b>91</b>
	<b>Provinsi</b>				-	8
1	Kab.	Boalemo	7	7	55	12
2	Kab.	Bone Bolango	17	17	32	14
3	Kab.	Gorontalo	18	17	73	21
4	Kab.	Gorontalo Utara	5	5	6	3
5	Kab.	Pohuwato	13	13	73	9
6	Kota	Gorontalo	6	6	13	24
<b>XXIX. Sulawesi Barat</b>			<b>68</b>	<b>55</b>	<b>398</b>	<b>137</b>
	<b>Provinsi</b>				1	7
1	Kab.	Majene	8	8	44	23
2	Kab.	Mamasa	17	17	103	33
3	Kab.	Mamuju	15	18	110	40
4	Kab.	Mamuju Utara	12	1	37	7
5	Kab.	Polewalimandar	16	11	103	27
<b>XXX. Maluku</b>			<b>82</b>	<b>48</b>	<b>399</b>	<b>160</b>
	<b>Provinsi</b>				14	9
1	Kab.	Buru Selatan	5	1	6	-
2	Kab.	Kepulauan Aru	10	7	2	3
3	Kab.	Maluku Barat Daya	8	3	6	-
4	Kab.	Maluku Tengah	14	14	167	38
5	Kab.	Maluku Tenggara	6	3	28	16
6	Kab.	Maluku Tenggara Barat	9	4	29	15
7	Kab.	Pulau Buru	5	3	33	24
8	Kab.	Seram Bagian Barat	10	10	63	27
9	Kab.	Seram Bagian Timur	6	1	9	6
10	Kab.	Tual	4	-	-	-
11	Kota	Ambon	5	2	42	22
<b>XXXI. Maluku Utara</b>			<b>111</b>	<b>42</b>	<b>328</b>	<b>184</b>
	<b>Provinsi</b>				14	8
1	Kab.	Kepulauan Sula	19	6	33	10
2	Kab.	Halmahera Barat	9	9	44	40
3	Kab.	Halmahera Selatan	30	5	15	13
4	Kab.	Halmahera Tengah	6	3	29	14
5	Kab.	Halmahera Timur	10	3	42	10
6	Kab.	Halmahera Utara	17	6	50	49
7	Kab.	Pulau Morotai	5	-	17	3
8	Kota	Ternate	7	3	36	16
9	Kota	Tidore Kepulauan	8	7	48	21
<b>XXXII. Papua</b>			<b>351</b>	<b>78</b>	<b>640</b>	<b>311</b>
	<b>Provinsi</b>				6	4
1	Kab.	Asmat	8	1	26	13
2	Kab.	Biak Numfor	19	6	75	13



NO.	PROVINSI KABUPATEN/KOTA		KERAGAN DATA			
			KEC	BPP EKSISTIN G	JUMLAH PENYULUH PERTANIAN (PNS)	PENYULUH PERTANIAN PNS YANG SUDAH DI FASILITASI R-2
1	2		3	4	5	6
3	Kab.	Boven Digoel	15	1	15	14
4	Kab.	Dei Yai	5	-	-	-
5	Kab.	Dogiyai	10	-	-	-
6	Kab.	Intan Jaya	6	-	-	-
7	Kab.	Jayapura	19	6	70	36
8	Kab.	Jayawijaya	11	8	47	26
9	Kab.	Keerom	7	7	39	36
10	Kab.	Kepulauan Yapen	12	5	76	21
11	Kab.	Lanny Jaya	10	-	-	-
12	Kab.	Mappi	10	1	24	13
13	Kab.	Merauke	20	4	50	21
14	Kab.	Memberamo Raya	8	-	-	-
15	Kab.	Memberamo Tengah	5	-	-	-
16	Kab.	Mimika	12	7	41	16
17	Kab.	Nabire	14	7	71	32
18	Kab.	Nduga	8	-	-	-
19	Kab.	Paniai	10	1	1	4
20	Kab.	Pegunungan Bintang	10	5	26	13
21	Kab.	Puncak	8	-	-	-
22	Kab.	Puncak Jaya	8	1	7	1
23	Kab.	Sarmi	10	2	11	6
24	Kab.	Supiori	5	5	7	4
25	Kab.	Tolikara	30	1	6	4
26	Kab.	Waropen	10	5	12	14
27	Kab.	Yahukimo	51	1	9	8
28	Kab.	Yalimo	5	-	-	-
29	Kota	Jayapura	5	4	21	12
<b>XXXIII. Papua Barat</b>			<b>144</b>	<b>26</b>	<b>362</b>	<b>186</b>
		<b>Provinsi</b>			14	5
1	Kab.	Fak Fak	9	2	49	33
2	Kab.	Kaimana	7	4	14	13
3	Kab.	Manokwari	29	7	73	47
4	Kab.	Maybrat	11	-	2	3
5	Kab.	Raja Ampat	17	1	17	6
6	Kab.	Sorong	19	6	75	37
7	Kab.	Sorong Selatan	4	-	1	6
8	Kab.	Tambrau	6	-	19	-
9	Kab.	Teluk Bintuni	24	1	23	9
10	Kab.	Teluk Wondama	13	1	56	14
11	Kota	Sorong	5	4	19	13
497	<b>TOTAL</b>		<b>6.672</b>	<b>5.016</b>	<b>28.462</b>	<b>9.589</b>